

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (686328) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum (500100) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, Februari 2020
Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, SH., MM.
NIP. 19680421 199501 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	50

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH (686328)
Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
TELEPON / FAXIMILE 024-8505189

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, Februari 2020

Kepala Sekretariat,



Kartini Tjandra Lestari, SH., MM.
NIP. 19680421 199501 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (686328) Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp86.525.355,- atau mencapai 0% karena estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp440.054.097.347,- atau 69,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp637.431.218.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.151.248.667 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp15.547.024.433, Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.074.017.073,-, dan Aset Lainnya (Neto) Rp530.207.161,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.641.191,- dan Rp32.132.607.476,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp70.861.355,-, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp444.214.789.237,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp444.143.9272.882,-).

Untuk Kegiatan Non Operasional, diperoleh Surplus Pelepasan Aset Non Lancar dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing yaitu sebesar Rp450.000,- dan Rp15.214.000,- sehingga diperoleh Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.15.664.000,- yang berarti entitas sampai dengan Tahun 2019 mengalami Defisit-LO sebesar (Rp444.128.263.882,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp32.777.853.366,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.444.128.263.882,-) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp443.483.017.992,- sehingga mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp645.245.890,-) dibandingkan dengan ekuitas awal tahun sehingga menghasilkan Ekuitas entitas per tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp32.132.607.476,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORA REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2019		% Thd Angg	REALISASI TA. 2018
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan	B.1	-	86.525.355	-	39.336.000
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			86.525.355		39.336.000
B. BELANJA NEGARA	B.2				
1. Rupiah Murni		637.431.218.000	440.054.097.347	69,04	518.806.257.127
a. Belanja Pegawai	B.3	63.949.751.000	30.640.590.419	47,91	1.713.913.676
b. Belanja Barang	B.4	563.164.967.000	400.027.076.185	71,03	510.081.244.351
c. Belanja Modal	B.5	10.316.500.000	9.386.430.743	90,98	7.011.099.100
JUMLAH BELANJA		637.431.218.000	440.054.097.347	69,04	518.806.257.127

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	3,443,404,933	
Belanja Dibayar di Muka	C.2	12,099,880,000	20,307,610,000
Persediaan	C.3	1,182,478,000	2,619,000
Jumlah Aset Lancar		16,725,762,933	20,310,229,000
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	26,016,017,111	17,579,378,911
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.5	9,375,000	9,375,000
Aset Tetap Lainnya	C.6	189,320,000	149,320,000
Akumulasi Penyusutan	C.7	(10,140,695,038)	(5,256,627,975)
Jumlah Aset Tetap		16,074,017,073	12,481,445,936
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	630,311,543	
Aset Lain-lain	C.9	14,250,000	14,250,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(114,354,382)	(13,462,559)
Jumlah Aset Lainnya		530,207,161	787,441
JUMLAH ASET		33,329,987,167	32,792,462,377
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	18,641,191	14,609,011
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18,641,191	14,609,011
JUMLAH KEWAJIBAN		18,641,191	14,609,011
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	33,311,345,976	32,777,853,366
Jumlah Ekuitas		33,311,345,976	32,777,853,366
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33,329,987,167	32,792,462,377

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Jumlah Pendapatan			
		70,861,355	7,500,000
		70,861,355	7,500,000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai			
		30,640,590,419	1,713,913,676
Beban Persediaan			
		50,529,600	41,400,250
Beban Barang dan Jasa			
		274,977,314,276	391,228,460,271
Beban Pemeliharaan			
		3,892,333,651	1,398,402,276
Beban Perjalanan Dinas			
		128,490,323,905	99,124,730,805
Beban Penyusutan dan Amortisasi			
		4,984,958,886	2,816,837,648
		443,036,050,737	496,323,744,926
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL			
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
		(442,965,189,382)	(496,316,244,926)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
		450,000	
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JK. PANJANG			
		15,214,000	17,486,000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL LAINNYA			
		15,664,000	17,486,000
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI POS LUAR BIASA			
		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO			
		(442,949,525,382)	(496,298,758,926)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1	32,777,853,366	76,778,503,755
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(442,949,525,382)	(496,298,758,926)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN			
AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR		-	(3,401,134,776)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
LAIN-LAIN		-	(3,401,134,776)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	443,483,017,992	455,699,243,313
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	533,492,610	(44,000,650,389)
EKUITAS AKHIR	E.5	33,311,345,976	32,777,853,366

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Dasar Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Presiden Nomor
Entitas dan 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Rencana Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat
Strategis Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketata usahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempunyai wewenang:

1. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.
2. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan barang milik negara.

3. Menandatangani perjanjian kerjasama.
4. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.
5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Visi Bawaslu **“Terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”**, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ikut melaksanakan Misi Bawaslu berupa:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan Kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Tahun 2019 berjalan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran belanja untuk menunjang kegiatan pengawasan pemilu baik secara preventif maupun secara partisipatif masyarakat, serta munculnya anggaran belanja berupa santunan untuk panitia pengawas *ad-hoc* yang mengalami kecelakaan maupun yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	63.949.751.000	63.949.751.000
Belanja Barang	590.942.202.000	563.164.967.000
Belanja Modal	7.297.500.000	10.316.500.000
Jumlah Belanja	662.189.453.000	637.431.218.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp86.525.355,- dengan kata lain persentasenya 0%, karena estimasi pendapatannya adalah Rp 0,-. Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 56,35% terhadap realisasi pendapatan TA 2018, hal ini disebabkan pada TA 2019 terdapat pendapatan yang cukup besar berasal dari pendapatan atas denda penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp65.361.355,-.

Realisasi
Pendapatan
Rp86.525.355

Adapun Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dengan TA 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA. 2019	REALISASI TA. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	86.525.355	39.336.000	119,96
Jumlah	86.525.355	39.336.000	119,96

Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Pendapatan PNBP 2019

URAIAN	TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	NILAI (Rp)
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	3-Jan-2019	85B251IN9E7N3LJG	500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	13-Feb-2019	93E3566UNJ634QQG	500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	15-Feb-2019	652B756QC626BDC1	500.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Kab. Pemalang	11-Mar-2019	EEB5A4OTGTI9K2RI	3.221.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Baw aslu Kab. Pekalongan	11-Mar-2019	C68C84OU1GDJUVJRI	11.193.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	26-Apr-2019	5AE358HOSQ1KDRTO	500.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas PT. Petraya Mitra Jaya	30-Apr-2019	190261303005261	1.809.220
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas CV. Prakarsa Manunggal	30-Apr-2019	190261303005265	1.912.988
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas CV. Alvaro Pratama	30-Apr-2019	190261303005258	2.358.644
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas PT. Merdeka Jaya Bersama	30-Apr-2019	190261303005259	1.257.270
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas CV. Cipta Abadi	30-Apr-2019	190261303005264	1.587.040
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	2-May-2019	D60B979VOM2NI83H	500.000
Pengembalian Belanja Barang TAYL Baw aslu Kab. Pekalongan	21-May-2019	E15B854LLV8S4SKI	800.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	19-Jun-2019	77B0F4D576RG4RLG	500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	8-Jul-2019	609BB7MHAAA4UUQO	500.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (PT. PURA BARUTAMA)	9-Jul-2019	926D86M8IPPDIO	47.772.794
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	12-Jul-2019	D6C54089PU3IFJSH	500.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (CV. PINOVE MEDIA SINERGI)	16-Jul-2019	9299555DDR033RRQ	909.100
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (CV. SOLUSI ARYA PRIMA)	16-Jul-2019	077DE6U8DG4RTU75	7.754.299
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5-Jul-2019	2E38C6U8DGA GCFSE	450.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	5-Sep-2019	A169C7QLTASSPANK	500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Klaten TA. 2008	28-Oct-2019	E488F1JNEGV NJKL3	500.000
Setor Pengembalian Belanja Panwas Kab. Wonogiri TA. 2008	31-Oct-2019	FC5C248VU0MSQKMG	500.000
JUMLAH			86.525.355

Realisasi Belanja
Rp637.431.218.000

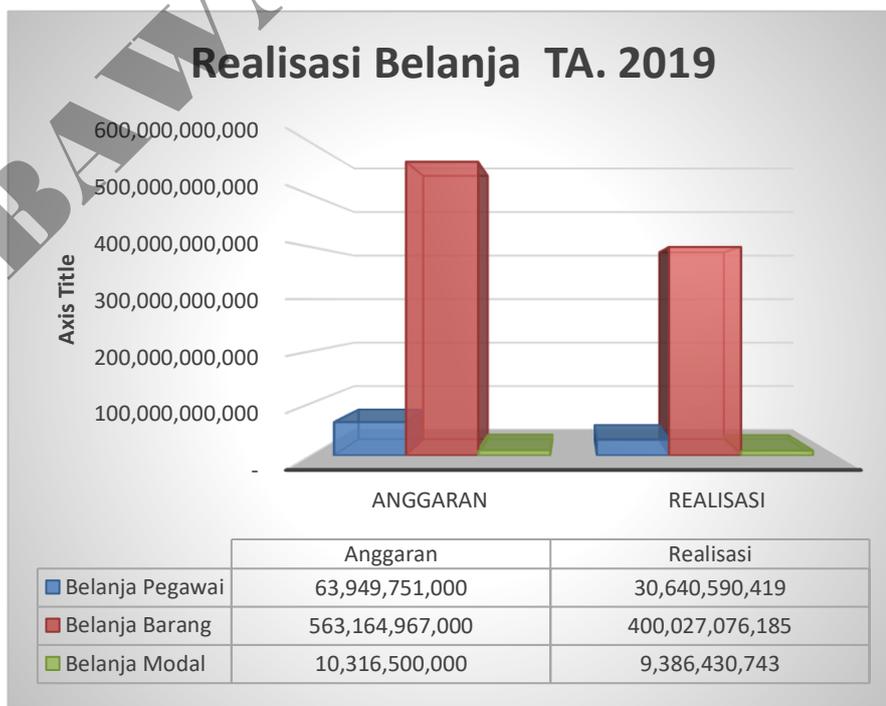
B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp439.967.571.992,- atau 69,04% dari anggaran belanja sebesar Rp637.431.218.000,-. Realisasi Belanja Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2019 seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni. Detail rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA.2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	63.949.751.000	30.640.590.419	47,91
Belanja Barang	563.164.967.000	400.027.076.185	71,03
Belanja Modal	10.316.500.000	9.386.430.743	90,98
TOTAL BELANJA	637.431.218.000	440.054.097.347	69,04

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar (15,18)%. Adapun perbandingan realisasi belanja TA 2019 dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2018	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	30.640.590.419	1.713.913.676	1.687,76
Belanja Barang	400.027.076.185	510.081.244.351	(21,58)
Belanja Modal	9.386.430.743	7.011.099.100	33,88
TOTAL BELANJA	440.054.097.347	518.806.257.127	(15,18)

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp30.640.590.419*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Rupiah Murni TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.640.590.419,- dan Rp1.713.913.676,-. Realisasi belanja pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 1687,76% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan akun jenis belanja uang kehormatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yaitu dari akun belanja barang (521111) menjadi akun belanja pegawai (511332);
2. Pada Tahun 2019, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan belanja kekurangan pembayaran karena adanya kenaikan uang kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018 selama masing-masing 4 (empat) bulan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yaitu total senilai

Rp2.995.388.000,-, serta mengeluarkan belanja Tunjangan Hari Raya (THR) serta uang kehormatan bulan ketiga belas untuk seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan total senilai Rp3.557.344.000,- sementara di Tahun 2018 tidak ada.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	361.788.840	175.193.200	51,58
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.871	3.120	60,36
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	20.029.768	9.519.600	52,47
Belanja Tunj. Anak PNS	2.453.610	1.375.304	43,95
Belanja Tunj. Struktural PNS	34.920.000	30.240.000	13,40
Belanja Tunj. PPh PNS	29.499.233	41.382.320	(40,28)
Belanja Tunj. Beras PNS	17.018.700	8.835.240	48,09
Belanja Uang Makan PNS	101.322.000	70.864.000	30,06
Belanja Tunj. Umum PNS	26.815.000	13.180.000	50,85
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	29.536.559.700	1.019.440.000	96,55
Belanja Uang Lembur PNS	47.874.000	36.630.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	462.302.832	307.250.892	33,54
Jumlah Belanja Kotor	30.640.591.554	1.713.913.676	1.687,76
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.135)	-	-
Jumlah Belanja Netto	30.640.590.419	1.713.913.676	1.687,76

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp400.027.076.185*

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp400.982.835.972 dan Rp510.081.244.351, Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan (648,96)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Penurunan belanja barang diantaranya disebabkan oleh penurunan belanja barang operasional yang dikarenakan perbedaan masa kerja Panwas Kecamatan pada Tahun 2019 hanya 6 bulan, sedangkan pada Tahun 2018 adalah 12 Bulan. Meskipun demikian terjadi peningkatan pada Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dikarenakan Tahun 2019 merupakan dilaksanakannya pemilihan umum

sehingga terjadi peningkatan belanja tersebut untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengawasan yang diantaranya adalah Sosialisasi Pengawasan, Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu, dan Supervisi Pengawasan antar lintas pengawas di jajaran pengawas di Jawa Tengah.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	166.030.231.631	309.480.550.679	(46,35)
Belanja Barang Non Operasional	72.394.980.561	49.656.674.997	45,79
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51.650.100	40.022.250	29,05
Belanja Jasa	29.183.888.087	50.326.979.387	(42,01)
Belanja Pemeliharaan	3.892.333.651	1.401.902.276	177,65
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	128.495.813.905	99.178.114.762	-
Jumlah Belanja Kotor	400.048.897.935	510.084.244.351	(21,57)
Pengembalian Belanja Barang	21.821.750	3.000.000	627,39
Jumlah Belanja Netto	400.027.076.185	510.081.244.351	(648,96)

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp9.386.430.743*

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp9.386.430.743 dan Rp7.011.099.100,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 33,88% dibandingkan dengan TA 2018, dikarenakan pada Tahun 2019 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah belanja memenuhi kebutuhan belanja modal seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah guna persiapan pelaksanaan persidangan penyelesaian sengketa pemilu di tingkat Kabupaten/Kota serta peralatan penunjang pengawasan pemilihan umum. Belanja modal TA 2019 senilai Rp9.386.430.743,- terbagi menjadi dua jenis belanja modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp8.716.119.200,- dan

belanja modal lainnya Rp670.311.543 yang merupakan belanja modal pengembangan website.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	Naik / (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.716.119.200	6.861.779.100	27,02
Belanja Modal Lainnya	670.311.543	149.320.000	348,91
Jumlah Belanja Kotor	9.386.430.743	7.011.099.100	33,88
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	9.386.430.743	7.011.099.100	33,88

Adapun rincian belanja modal Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Jumlah Barang / Unit	Nilai Satuan	Nilai Total
A.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1	Genset	35	21.560.000	754.600.000
2	Lemari Besi/Metal	350	2.719.000	951.650.000
3	Mesin Absensi	35	2.925.050	102.376.750
4	Meja Kerja	62	3.184.500	197.439.000
5	Kursi Besi/Metal	229		671.780.000
6	Meja Rapat	245	4.900.000	1.200.500.000
7	AC. Split	105	3.440.100	361.210.500
8	Sound System	35	12.900.050	451.501.750
9	Voice Recorder	35	2.000.000	70.000.000
10	Tripod Camera	35	2.680.000	93.800.000
11	Camera Digital	35	7.900.000	276.500.000
12	P.C Unit	190	13.500.000	2.565.000.000
13	Laptop	8	13.500.000	108.000.000
14	Scanner	35	16.000.320	560.011.200
15	Kursi Besi Metal (Ekstrakomptabel)	1050	335.000	351.750.000
B.	Belanja Modal Lainnya			
1.	Pembuatan Website	34		605.311.543
2.	Pengembangan Website	3		25.000.000
3.	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	40.000.000	40.000.000
	TOTAL			9.386.430.743

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3.443.404.933*

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing – masing adalah Rp3.443.404.933,- dan Rp0,-. Kas lainnya merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, sementara setara kas adalah investasi – investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian saldo kas lainnya dan setara kas sebesar Rp3.443.404.933 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	227.933
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	3.443.177.000
Jumlah Belanja	3.443.404.933

Adapun rincian kas lainnya dan setara kas disajikan dalam lampiran.

C.2 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar di
Muka
Rp12.099.880.000*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp12.099.880.000,- dan Rp20.307.610.000,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo belanja dibayar dimuka Tahun 2019 senilai Rp12.099.880.000,- merupakan Saldo belanja dibayar dimuka yang belanjanya dilakukan pada Tahun 2018 dan

Tahun 2019. Adapun Perbandingan Belanja Dibayar di Muka antara per 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Belanja Dibayar di Muka per tanggal
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja dibayar di muka	12.099.880.000	20.307.610.000	(40,42)
Jumlah Belanja	12.099.880.000	20.307.610.000	(40,42)

Adapun rincian belanja dibayar dimuka Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH UNIT	LAMA SEWA	LAMA BEBAN	Nilai Total	Pengakuan Beban	Belanja dibayar dimuka
Sewa Kendaraan Operasional Bawaslus Kabupaten/Kota (Tahun 2018)	202	20	13	21.348.800.000	13.876.720.000	7.472.080.000
Sewa Kendaraan Operasional Bawaslus Kabupaten/Kota (Tahun 2019)	202	4	0	4.204.800.000	-	4.204.800.000
Sewa Gedung Kantor Bawaslus Kabupaten Brebes	1	12	8	90.000.000	60.000.000	30.000.000
Sewa Gedung Kantor Bawaslus Kota Salatiga	1	24	3	168.000.000	21.000.000	147.000.000
Sewa Gedung Kantor Bawaslus Kota Surakarta	1	12	0	150.000.000	-	150.000.000
Sewa Gedung Kantor Bawaslus Kabupaten Tegal	1	12	0	96.000.000	-	96.000.000
Jumlah				26.057.600.000	13.957.720.000	12.099.880.000

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp1.182.478.000

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.182.478.000,- dan Rp2.619.000,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perbandingan persediaan barang konsumsi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018*

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	1,182,478,000	2,619,000
Jumlah	1,182,478,000	2,619,000

Adapun rincian perhitungan saldo barang konsumsi adalah sebagai berikut:

*Rincian saldo persediaan barang konsumsi per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Saldo Barang Konsumsi per 31 Desember 2018	2,619,000
Mutasi tambah:	
Belanja Barang Konsumsi Tahun 2019	51,650,100
Sisa Buku Saksi Parpol	1,178,738,500
Mutasi kurang:	
Penggunaan Barang Konsumsi	(50,529,600)
Saldo per 31 Desember 2019	1,182,478,000

Mutasi tambah sebesar Rp1.178.738.500 merupakan sisa buku saksi parpol yang atas rekomendasi pemeriksaan BPK dianggap menjadi beban persediaan konsumsi.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin

Rp26.016.017.111

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp26.016.017.111 dan Rp17.579.378.911. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	17.579.378.911
Mutasi tambah:	8.436.638.200
Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019	8.364.369.200
Penerimaan Hibah	72.269.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	26.016.017.111
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(10.131.320.038)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	15.884.697.073

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp8.364.369.200 merupakan realisasi belanja modal TA. 2019 sebesar Rp.8.716.119.200 dikurangi dengan Belanja Modal Ekstrakomptabel sebesar Rp.351.750.000. Berikut rincian pembelian BMN selama Tahun 2019 senilai Rp.8.364.369.200 :

No	Jenis Barang	Jumlah Barang / Unit	Nilai Satuan	Nilai Total
1	Genset	35	21.560.000	754.600.000
2	Lemari Besi/Metal	350	2.719.000	951.650.000
3	Mesin Absensi	35	2.925.050	102.376.750
4	Meja Kerja	62	3.184.500	197.439.000
5	Kursi Besi/Metal	229		671.780.000
6	Meja Rapat	245	4.900.000	1.200.500.000
7	AC. Split	105	3.440.100	361.210.500
8	Sound System	35	12.900.050	451.501.750
9	Voice Recorder	35	2.000.000	70.000.000
10	Tripod Camera	35	2.680.000	93.800.000
11	Camera Digital	35	7.900.000	276.500.000
12	P.C Unit	190	13.500.000	2.565.000.000
13	Laptop	8	13.500.000	108.000.000
14	Scanner	35	16.000.320	560.011.200
	TOTAL			8.364.369.200

Sedangkan mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp72.269.000- merupakan penerimaan

hibah dari bank hasil *beauty contest* atas pembukaan rekening hibah Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0182/Bawaslu/SJ/PW.07/IX/2019 tentang Tata Cara Penunjukan Bank dan Penerimaan Uang dan Barang Atas Penempatan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun rincian peralatan dan mesin dari penerimaan hibah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah
1	Kab. Blora	Meja Pingpong	1	3.500.000	3.500.000
		Kulkas	1	2.500.000	2.500.000
		Sepeda	7	2.000.000	14.000.000
2	Kab. Kebumen	Note Book	1	4.000.000	4.000.000
		Note Book	1	4.000.000	4.000.000
		Drone	1	17.000.000	17.000.000
		Printer	1	2.100.000	2.100.000
3	Kab. Pemalang	AC	2	3.250.000	6.500.000
		Lemari ES	1	2.500.000	2.500.000
		Meja Pingpong	1	1.825.000	1.825.000
4	Kab. Purworejo	Televisi LED	1	2.610.000	2.610.000
		AC	1	4.800.000	4.800.000
		LENSA FIX	1	1.650.000	1.650.000
		Laptop	1	3.799.000	3.799.000
		Kulkas	1	1.485.000	1.485.000
JUMLAH TOTAL					72.269.000

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp9.375.000*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sama, yaitu sebesar Rp9.375.000 dan Rp9.375.000 atau dengan kata lain tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan Jalan, irigasi, dan jaringan.

Mutasi nilai jalan, irigasi, dan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	9.375.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	9.375.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	9.375.000
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

C.6 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp189.320.000*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp189.320.000 dan Rp149.320.000. Aset Tetap per 31 Desember 2019 mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 dikarenakan terdapat mutasi masuk berupa Aset Tetap Dalam Renovasi (ATR) yang merupakan perbaikan gedung kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri sebesar Rp40.000.000,-. Perbandingan aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dengan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Perubahan (%)
Aset Tetap Lainnya	189.320.000	149.320.000	0,27
Jumlah Belanja	189.320.000	149.320.000	0,27

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 merupakan belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) terhadap pekerjaan pembuatan ruang sidang pada bangunan Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	149.320.000
Mutasi tambah:	40.000.000
Pemeliharaan Gedung Bawaslu Kab. Wonogiri	40.000.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	189.320.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	189.320.000

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp10.140.695.038*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp10.140.695.038 dan Rp5.256.627.975. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dengan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Perubahan (%)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(10,140,695,038)	(5,256,627,975)	92.91%
Jumlah Belanja	(10,140,695,038)	(5,256,627,975)	92.91%

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	26.016.017.111	10.131.320.038	15.884.697.073
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	9.375.000	-
	Akumulasi Penyusutan	26.025.392.111	10.140.695.038	15.884.697.073

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini bersama dengan rincian aset tetap peralatan dan mesin.

C.8 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp630.311.543*

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp630.311.543 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berupa software yang baru timbul pada Tahun 2019 atas belanja pembuatan website. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dengan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Perubahan (%)
Aset Tak Berwujud	630.311.543	0	-
Jumlah Belanja	630.311.543	0	-

Mutasi nilai asset tak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	630.311.543
Belanja Pembuatan/Pengembangan Website	630.311.543
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	630.311.543
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	100.716.836
Nilai Buku per 31 Desember 2019	529.594.707

C.9 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp14.250.000*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sama yaitu Rp14.250.000,- atau dengan kata lain tidak terdapat transaksi terhadap aset lain-lain. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Perbandingan Aset lain-lain per 31 Desember 2019 dengan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Perubahan (%)
Aset Lain Lain	14.250.000	14.250.000	0,00%
Jumlah Belanja	14.250.000	14.250.000	0,00%

Rincian aset tetap yang di reklasifikasikan menjadi aset lain-lain pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian aset tetap yang di reklasifikasikan menjadi aset lain-lain sampai dengan Tahun 2019

No	URAIAN BARANG	JUMLAH UNIT	NILAI PEROLEHAN
1	Kursi Besi	2	1.520.000
2	Mesin Scanner Faximile	1	1.950.000
3	Printer	2	10.780.000
Jumlah Total			14.250.000

Mutasi nilai asset tak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	14.250.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	14.250.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	13.637.546
Nilai Buku per 31 Desember 2019	612.454

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp114.354.382*

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp114.354.382 dan Rp13.462.559. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tersebut merupakan total akumulasi amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2019.

Perbandingan Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dengan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(114,354,382)	(13,462,559)	749.43
Jumlah Belanja	(114,354,382)	(13,462,559)	749.43

Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebanding dengan kenaikan nilai Aset Lainnya di Tahun 2019 yang timbul karena adanya peningkatan pada amortisasi aset tak berwujud berupa software.

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp18.641.191,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp18.641.191,- dan Rp14.609.011,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Kenaikan Utang pihak ketiga per 31 Desember 2019 dikarenakan timbulnya beban langganan internet di Tahun 2019 yang tidak ada di Tahun 2018.

C.12 Ekuitas

*Ekuitas
Rp32.132.607.476*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.132.607.476,- dan Rp32.777.853.366,-, Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Lainnya
70.861.355*

Total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp70.861.355,- dan Rp7.500.000,-.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp70.861.355 tersebut terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	65,361,355
Pendapatan Anggaran Lain-lain	5,500,000
Total	70,861,355

Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp65.361.355 terdiri atas:

Uraian Pengadaan	Penyedia	Jumlah
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Pengawas TPS	CV. Prakarsa Manunggal	1,912,988
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Pengawas TPS	CV. Cipta Abadi	1,587,040
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Pengawas TPS	PT. Petraya Mitra Jaya	1,809,220
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Pengawas TPS	CV. Alvaro Pratama	2,358,644
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Pengawas TPS	CV. Merdeka Jaya Bersama	1,257,270
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Saksi Parpol	PT. Pura Barutama	47,772,794
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Saksi Parpol	CV. Pinove Media Sinergi	909,100
Pekerjaan Pengadaan Buku Saku Saksi Parpol	CV. Solusi Arya Prima	7,754,299
Total		65,361,355

serta pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp5.500.000 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Pengembalian Belanja Panwas Kabupaten Klaten TA. 2008	3,500,000
Pengembalian Belanja Panwas Kabupaten Wonogiri TA. 2008	2,000,000
Total	5,500,000

Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah Pendapatan Negara yang diperoleh melalui Satker yang berasal dari selain Pajak.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp30.640.590.419

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp30.640.590.419,- dan Rp1.713.913.676,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1687,76% terhadap beban pegawai Tahun 2018 dikarenakan adanya kenaikan signifikan pada jenis beban uang kehormatan pejabat Negara yaitu sebesar 2797,33%, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan jenis belanja honorarium Bawaslu Kabupaten/Kota dari jenis belanja barang pada TA 2018 menjadi jenis belanja pegawai di TA 2019, adanya pembayaran kekurangan uang kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota atas kenaikan Uang Kehormatan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019.

Adapun rincian perbandingan beban pegawai Tahun 2019 dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	361,788,840	175,193,200	106.51
Beban Pembulatan Gaji PNS	6,736	3,120	115.90
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	20,029,768	9,519,600	110.41
Beban Tunjangan Anak PNS	2,453,610	1,375,304	78.40
Beban Tunjangan Struktural PNS	34,920,000	30,240,000	15.48
Beban Tunjangan PPh PNS	29,499,233	41,382,320	(28.72)
Beban Tunjangan Beras PNS	17,018,700	8,835,240	92.62
Beban Uang Makan PNS	101,322,000	70,864,000	42.98
Beban Tunjangan Umum PNS	26,815,000	13,180,000	103.45
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	29,536,559,700	1,019,440,000	2,797.33
Beban Uang Lembur	47,874,000	36,630,000	30.70
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	462,302,832	307,250,892	50.46
Jumlah Belanja	30,640,590,419	1,713,913,676	1,687.76

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp50.529.600*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp50.529.600 dan Rp41.400.250,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perbandingan beban persediaan Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	50,529,600	41,400,250	22.05
Jumlah Belanja	50,529,600	41,400,250	22.05

Keseluruhan Beban Persediaan sampai dengan Tahun 2019 dan 2018 merupakan Beban Persediaan Konsumsi.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp274.977.314.276*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp274.977.314.276,- dan Rp391.228.460.271,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (29,71)% dibanding dengan Tahun 2018, diantaranya karena pada Tahun 2019 Panwas Kecamatan hanya sampai dengan bulan Juni 2019 atau hanya 6 bulan masa kerja, sehingga mengakibatkan menurunnya beban keperluan perkantoran dimana pada Tahun 2018 Panwas Kecamatan memiliki masa kerja full 12 bulan, serta adanya perubahan akun belanja uang kehormatan dari belanja barang pada Tahun Anggaran 2018 menjadi akun belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2019 ini. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	161,156,554,791	307,127,489,879	(47.53)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,648,101,708	1,983,360,000	(16.90)
Beban Barang Operasional Lainnya	3,230,319,632	360,130,300	796.99
Beban Bahan	62,754,911,061	32,376,314,297	93.83
Beban Honor Output Kegiatan	6,570,700,750	17,136,715,000	(61.66)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,890,346,000	143,645,700	1,215.98
Beban Langganan Listrik	757,129,300	808,686,266	(6.38)
Beban Langganan Telepon	78,413,783	122,951,609	(36.22)
Beban Langganan Air	83,684,903	75,875,146	10.29
Beban Jasa Pos dan Giro	23,532,470	5,869,500	300.93
Beban Jasa Konsultan	49,000,000	-	-
Beban Sewa	19,717,605,250	20,356,050,250	(3.14)
Beban Jasa Profesi	7,954,795,500	7,323,965,000	8.61
Beban Jasa Lainnya	8,710,469,128	3,391,417,324	156.84
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	351,750,000	15,990,000	2,099.81
Jumlah Belanja	274,977,314,276	391,228,460,271	(29.71)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp3.892.333.651*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp3.892.333.651,- dan Rp1.398.402.276,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 sebesar 178,34% karena munculnya beban pemeliharaan gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 ini yang sebelumnya belum ada. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	866,344,896	687,228,037	810.94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,025,988,755	711,174,239	2749.85
Jumlah	3,892,333,651	1,398,402,276	178.3

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp128.490.323.905*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp128.490.323.905,- dan Rp99.124.730.805,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan karena adanya banyak kegiatan rapat koordinasi dan bintek-bintek pengawasan tahapan pemilu tahun 2019 dengan menggunakan akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota baik dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun Panwaslu Kecamatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	14,908,412,441	7,452,047,586	100.06
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,391,338,484	20,698,150,500	27.51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82,910,523,980	30,106,725,944	175.39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,280,049,000	40,867,806,775	(89.53)
Jumlah	128,490,323,905	99,124,730,805	29.62

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp4.984.958.886

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp4.984.958.886,- dan Rp2.816.837.648,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2019 dan 2018*

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.884.067.063	2.814.751.154	73,52
Beban Penyusutan Jaringan	-	1.875.000	-
Beban Amortisasi Software	100.716.836	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	174.987	211.494	(17,26)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.984.958.886	2.816.837.648	76,97

D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp15.664.000

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk TA. 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp15.664.000,- dan

Rp17.486.000,-. Rincian surplus dari kegiatan non operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	450,000	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15,214,000	17,486,000	(12.99)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	15,664,000	17,486,000	(10.42)

Defisit Laporan
Operasional
Rp444.128.263.882

D.9 Defisit LO

Nilai Defisit LO TA 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp442.949.525.382 dan Rp496.298.758.926.

PPID BAWASLU

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp32.777.853.366

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.777.853.366,- dan Rp76.778.503.755,-.

Defisit LO
Rp442.949.525.382

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp442.949.525.382 dan Rp496.298.758.926. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp443.483.017.992

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing adalah sebesar Rp443.483.017.992,- dan Rp455.699.243.313,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Adapun rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2019

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	440,054,097,347
Diterima dari Entitas Lain	(86,525,355)
Pengesahan Hibah Langsung	3,515,446,000
Jumlah	443,483,017,992

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Periode sampai dengan Tahun 2019, DKEL nya Rp440.054.986.628,- merupakan Belanja per 31 Desember 2019 yang ditagihkan pada BUN, sedangkan DDEL sebesar Rp86.525.355,- merupakan penyetoran pendapatan yang telah di setor ke BUN.

E.3.2 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan transaksi pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.515.446.000. Rincian Pengesahan hibah langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran.

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Penurunan Ekuitas
Rp533.492.610*

Nilai Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp533.492.610 dan Rp44.000.650.389.

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp33.311.345.976*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp33.311.345.976,- dan Rp32.777.853.366,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

A. Pendapatan jasa giro atas rekening hibah Bawaslu Kabupaten Purworejo, Pemalang, Wonosobo, dan Bawaslu Kota Surakarta telah disetor di Tahun 2020, sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Sragen masih menunggu konfirmasi akun pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun rincian setor jasa giro adalah sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten/Kota	Tanggal Setor	Nilai
Kabupaten Purworejo	28 Januari 2020	143.685
Kabupaten Pemalang	7 Januari 2020	2.190
Kabupaten Wonosobo	23 Januari 2020	16.899
Kota Surakarta	13 Januari 2020	61.659
Jumlah		224.433

B. Berdasarkan atas *stock opname* atas sisa buku saksi oleh BPK terdapat sisa buku saksi senilai Rp.1.178738.500 yang kemudian direkomendasikan oleh BPK sebagai barang persediaan konsumsi.